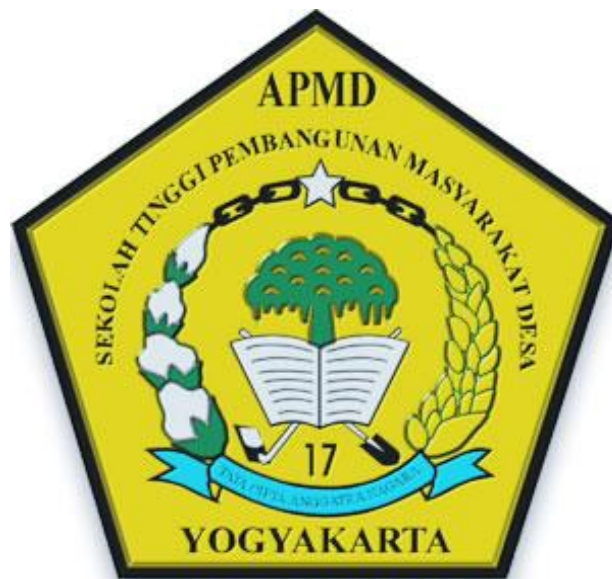


**PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016 DI DESA WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN
SLEMAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

RISMON FAITSAWIAT SOLOSSA

13520077

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

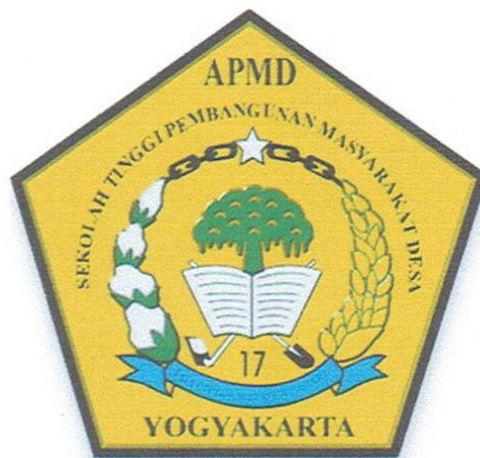
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2018

**PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016 DI DESA WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN
SLEMAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

RISMON FAITSAWIAT SOLOSSA

13520077

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

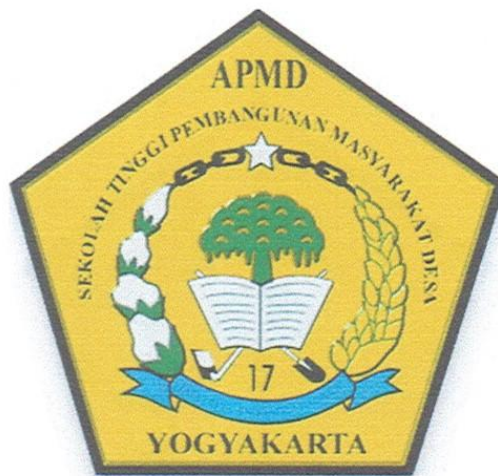
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA



**PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016 DI DESA WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN
SLEMAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

RISMON FAITSAWIAT SOLOSSA
13520077

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016 DI DESA WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN sebagai syarat memperoleh gelar sarjana bukan merupakan hasil karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apa bila kemudian hari ditemukan adanya plagiasi dalam skripsi ini.

Yogyakarta 09 April 2018



Rismen Faitsawiat Solossa
13520077

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Prodi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 03 April 2018
Jam : 08.30
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Drs. Hastowiyono, MS
Ketua/Penguji/Pembimbing



Dr. Widodo Triputro, M.Si
Penguji Samping I



Drs. Suharyanto, M.M
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Prodi Studi Ilmu Pemerintahan



Corporus Sandan, S.IP, M.A

MOTTO

Kebahagiaan itu sederhana, ketika orang-orang yang ada di sekeliling kita juga ikut bahagia

Kemenangan hanya datang kepada orang yang siap, sedangkan kegagalan akan terjadi bila kita menyerah (B.J. Habibie)

Hanya dengan mengambil resiko hiduplah kebebasan dapat di-capai, seorang yang tidak berani mempertaruhkan hidupnya, tidak diragukan memang dapat diakui sebagai pribadi tetapi ia tidak akan mencapai hakekat pengakuan sebagai suatu kesadaran diri yang mandiri (Hegel)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-NYA, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, ada pun skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Almamaterku Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
- ❖ Seorang Ibu tersayang Ibu Yosina Kumuay atas kasih sayangnya yang tak terhingga, terimakasih buat doanya yang tak pernah berhenti kepada saya sehingga hari ini saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik Dan terimakasih juga buat Ibu yang telah menggantikan sosok ayah (al.Yohan Solossa) bagi kehidupan saya.
- ❖ Istri tercinta Emi Waray dan seorang putri tersayang Riska Yostina Solossa yang selalu ada hadir untuk mendampingi dan selalu menjadi penyemangat hidup saya.
- ❖ Saudara kandung saya Febby Solossa, Rista Solossa, Riski Solossa dan Riswan Solossa, Stefen Solossa, Siska Solossa, Kenzy Solossa, Tasya manihi, dan Beto Manihin yang selalu saya banggakan
- ❖ Tanta Albertina Solossa, Antonai Solossa, Bapak Martinus Solossa, Oktovianus Duit, Antoneta Solossa dan ipar Iswan, atas dukungan berupa moril maupun materi sehingga saya bisa jadi seperti ini karna tanpa mereka saya tidak dapat melanjutkan pendidikan saya, dalam menempu gelar sarjana
- ❖ Om Welem, mamade Kartini, Kaka Sokrates Kumuay, Kaka Nita Kumune, Kaka Soni Kumune dan Kaka Alfredo Reri
- ❖ Keluarga besar Solossa, Kumuay, dan Waray
- ❖ Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang telah mendidik saya
- ❖ Kaka Rahap Harek Weremba, Jeny Suparto, Albina, Yana serta Abang Marinus Mofu dan Abang Marthen Gewo yang juga telah membantu saya semasa hidup di Yogyakarta
- ❖ Adik-adik saya Marteda Solossa, Diana Berdaneta Solossa, Andarias Riki Bless, Femi Bless, Karla Safkaur, dan Karlin Sraun yang sama-sama menimba ilmu di kota Gudek
- ❖ Teman-teman Seperjuangan Jonatan Undagi, Frengky Manek, Faturahman Asrul, Matius Undagi, Jefri, Hans, Sapriyono, Risky dan Era

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatnya yang selalu melimpa didalam kehidupan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016 DI DESA WONOKERTO KECAMATAN TURU KABUPATEN SLEMAN” dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana dari Progran Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi menulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk dan bimbingan yang telah penulis terima selama malakukan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian untuk penulis;
3. Bapak Drs. Hastowiyono, MS selaku dosen pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan ini.
4. Dr. Widodo Triputro, M.Si dan Drs. Suharyanto, M.M selaku dosen penguji dan sekalian yang memberikan saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi penulis

5. Ibu Dra. Herawati, MPA selaku dosen wali yang telah membimbing penulis mulai dari semester awal, proses akademis hingga penulis berkonsultasi dalam pengejuan judul skripsi.
6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD" Yogyakarta
7. Pihak Pemerintah Desa Wonokerto, Ketua BPD, Ketua LPMD, Kepala Dukuh Sempu, Kepala Dukuh Becici, Kepala Dukuh Tunggularum, Kepala Dukuh Imorejo, Kepala Dukuh Kembang, Ketua PKK,
8. Terlebih khusus buat Mas Wahid dan Mas Sumadi serta seluruh masyarakat Desa Wonokerto yang tak dapat disebutkan namanya satu per-satu penulis mengucapkan banyak terimah kasih yang tak terhingga atas kerja samanya sehingga dapat membantu peneliti dalam memberikan data-data yang dibutuhkan .
9. Ibu serta istri dan anak tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya
10. Teman-teman di Organisasi Serikat Mahasiswa Indonesia
11. Serta semua pihak yang tak dapat penulis menyebutkan namanya satu per-satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran membangun masih penyusun butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta 09 April 2018
Penulis

Rismon Faitsawiat Solossa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SINOPSIS	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
1. Kedudukan dan Kewenangan Desa	7
2. Pemerintah Desa	11
3. Pembangunan Desa	14
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa	22
F. Ruang Lingkup Penelitian	27
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa	28
2. Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa	28
3. Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Desa	29
G. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29

2. Subyek Penelitian	30
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Teknik Analisis Data	35
BAB II DESKRIPSI UMUM PROFIL DESA WONOKERTO	37
A. Geografis Desa Wonokerto	37
B. Demografis Desa Wonokerto	40
C. Sosial, Ekonomi dan Budaya Desa Wonokerto	45
D. Kondisi Tata Guna Lahan Desa Wonokerto	55
E. Pemerintah Desa Wonokerto	77
BAB III PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016 DI DESA WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN	79
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 di Desa Wonokerto	80
2. Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 di Desa Wonokerto	100
3. Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 di Desa Wonokerto	115
BAB IV Kesimpulan dan Saran	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Identitas Informan	32
Tabel II.1	Pembagian Wilayah Pedukuhan, RT Dan RW Desa Wonokerto	38
Tabel II.2	Penggunaan Lahan Eksisting Desa Wonokerto	39
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Pedukuhan	41
Tabel II.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur	42
Tabel II.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan	43
Tabel II.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	44
Tabel II.8	Kepadatan Penduduk Menurut Pedukuhan	45
Tabel II.9	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	46
Tabel II.10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Wonokerto	48
Tabel II.11	Sebaran Fasilitas Ekonomi Desa Wonokerto	49
Tabel II.12	Potensi Ekonomi Desa Wonokerto	50
Tabel II.13	Jenis Kegiatan Budaya Desa Wonokerto	53
Tabel II.14	Jenis Kegiatan Masyarakat Lokal Desa Wonokerto	54
Tabel II.15	Potensi Pertanian Desa Wonokerto	56
Tabel II.16	Potensi Sumber Daya Alam Desa Wonokerto	58
Tabel II.17	Penggunaan Lahan Desa Wonokerto	59
Tabel II.18	Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan	60
Tabel II.19	Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan	61
Tabel II.20	Jumlah Penyandang Cacat	62
Tabel II.21	Jumlah dan Sebaran Fasilitas Peribadatan	63
Tabel II.22	Jumlah dan Sebaran Fasilitas Perekonomian	64
Tabel II.23	Ruang Terbuka Hujau	65

Tabel II.24	Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum	66
Tabel II.25	Kondisi Jaringan Jalan Desa Wonokerto	67
Tabel II.26	Kondisi Jembatan Desa Wonokerto	68
Tabel II.27	Kondisi Jaringan Drainase Desa Wonokerto	69
Tabel II.28	Kondisi Jaringan Irigasi Desa Wonokerto	70
Tabel II.29	Sumber Air Bersih per Rumah	71
Tabel II.30	Pengelolaan Sampah Desa Wonokerto	72
Tabel II.31	Kondisi Saluran Limbah Rumah Tangga Desa Wonokerto	73
Tabel II.32	Penggunaan MCK Desa Wonokerto	74
Tabel II.33	Pelayanan Jaringan Listrik per Rumah	75
Tabel II.34	Kondisi Rumah Tiap Padukuhan	76
Tabel II.35	Kondisi Rumah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010	77

DAFTAR BAGAN

Bagan. 1	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonokerto	77
Bagan. 2	Simulasi Pengawasan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	117
Bagan. 3	Rekonstruksi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam kerangka UU Desa	120

DAFTAR LAMPIRAN

1. Permohonan Ijin Penelitian STPMD”APMD” Yogyakarta
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Penelitian Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Peraturan Desa Wonokerto No. 12 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2016
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2016 Bidang Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian dan Dokumentasi Pembangunan Hasil Gotong Royong Masyarakat Desa

INTISARI

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dinyatakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 81 ayat (1) bahwa, Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam hal pembangunan yang terjadi di Desa Wonokerto masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada saat pelaksanaan Kulia Kerja Nyata (KKN), ditemukan bahwa dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Wonokerto tidak semua tim penyusun yang di bentuk ikut terlibat dalam proses penyusunan rancangan RKP Desa, dan permasalahan lainnya juga seperti tidak semua unsur masyarakat desa terlibat dalam Musyawarah Desa, tidak semua panitia pelaksana RKP Desa yang di bentuk ikut terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja, serta tidak dilakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan (panitia pelaksana RKP Desa) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Serta juga beberapa permasalahan yang ada pada pemerintah desa wonokerto seperti, belum optimalnya Infentarisasi sumber PADesa belum optimal, dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih tahun 2015-2021, menggantikan Kepala Desa periode tahun 2009-2015, merupakan kendala dan permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan jalannya Pemerintahan Desa. Dengan tidak adanya kepala desa definitif membuat pelaksanaan APBDes Wonokerto tahun 2015 tertunda-tunda. Maka dari itu pelaksanaan pembangunan Desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil kajian dan analisis yang menyeluruh terhadap segala macam potensi dan masalah yang kemungkinan akan dihadapi. Berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah Desa Wonokerto beserta masyarakat juga berusaha untuk membangun Desa Wonokerto melalui Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Di Desa Wonokerto, ada pun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subyek pada penelitian ini adalah para aktor Desa yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekertaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Dukuh/Kadus), BPD, Pengurus LPMD, PKK, Pengurus KarangTaruna, dan Pengurus PPDI, serta Tim Penyusun RKP Desa. Penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: Interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi, serta Metode analisi yang digunakan adalah metode deskriptif.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan RKP Desa tahun 2016 di Desa Wonokerto bahwa : *Pertama*. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 di Desa Wonokerto Secara umum diawali dengan Musyawarah Desa dalam, membentuk Tim Penyusun RKP Desa, Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun. Namun demikian penyusunan rancangan RKP Desa tidak semua tim yang dibentuk ikut terlibat hanya Pemerintah Desa sendirilah yang menyusun, dan dilanjutkan dengan Penyusunan RKP Desa pada Musrenbangdes, serta Penetapan RKP Desa dengan Peraturan Desa Nomor 12 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2016 di Desa Wonokerto. *Kedua*. Pelaksanaan RKP Desa tahun 2016 di Desa Wonokerto dilaksanakan secara swakelola, partisipatif, gotong royong, dan swadaya dari masyarakat Desa Wonokerto, dimana dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat Desa melaksanakan pembangunan, *Ketiga*. Pengawasan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dilakukan oleh Kecamatan Turi sebagai delegasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Desa Wonokerto dan BPD Wonokerto serta partisipatif dari unsur masyarakat.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Pemerintah Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, secara tidak langsung membentuk interpretasi baru kebijakan pemerintah dalam memposisikan Desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, Desa sering dipandang sebelah mata dan bahkan dikesampingkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, cara pandang ini berdampak pada lebarnya kesenjangan di segala aspek bila dibandingkan dengan kota, dimana Desa menjadi pusat/sumber keterbelakangan, keterisolasian, kemiskinan, kebodohan, serta rendahnya tingkat kesehatan.

Setelah diterbitkannya UU Desa, secara legalitas Desa kini dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diikuti dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan demikian, proporsionalitas Desa sebagai objek harus dihilangkan sebab kini Desa telah memiliki legalitas untuk mengatur dan mengurus dirinya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki sehingga diharapkan kedepan, Desa bukan lagi sebagai pusat/sumber masalah tetapi sebaliknya menjadi basis kekuatan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi Desa

memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional dari segala aspek, baik dari aspek ekonomi, aspek politik, serta aspek sosial budaya (Oka Nyoman 2009).

Konsep besar Pelaksanaan Pembangunan Desa, didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan lebih tehnisnya di muat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang secara jelas disebutkan dalam bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu pembangunan Desa harus dilakukan dengan baik serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat, atau dengan kata lain pembangunan di Desa dapat menyentuh langsung kepada masyarakat yang ada di Desa.

Maka dari itu pelaksanaan pembangunan Desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil kajian dan analisis yang menyeluruh terhadap segala macam potensi dan masalah yang kemungkinan akan dihadapi. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan dan program pembangunan Desa dimasa mendatang dengan melibatkan masyarakat secara maksimal, karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Sutoro Eko 2005).

Dalam pelaksanaan pembangunan ada beberapa tahapan yang harus ditempuh diantaranya yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling vital dalam proses pelaksanaan pembangunan dan juga merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan (Wahyudin Kessa 2015). Hal ini pun secara langsung juga telah dimuat dalam UU No. 6/2014 Pasal 78 ayat (2), bahwa pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dengan demikian tiga tahapan tersebut merupakan proses yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Muhi Ali Hanapiah (2011) Salah satu kunci dari

keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana pelaksanaan pembangunan dilakukan. Dan dalam kerangka Pembangunan Desa “Desa Membangun” harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan Desa yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik (Wahyudin Kessa 2015).

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dinyatakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 81 ayat (1) bahwa, Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dengan demikian Desa diharuskan dan menjadi prasarat dalam pelaksanaan pembangunan Desa serta prasyarat penerimaan dana Desa dengan membuat Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan dalam pelaksanaannya juga harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan (Harry Cristian 2015). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, untuk proses pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa (Harry Cristian 2015).

Pada umumnya, RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dimulai dengan Proses penyusunan RKP Desa berdasarkan pada proses penjangkaran aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai tahap akhir dalam penentuan kebijakan pembangunan di tingkat desa.

RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa Sebagai dokumen resmi Desa, serta juga mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan Desa. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkatan Desa (Harry Cristian 2015).

Berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah Desa Wonokerto beserta masyarakat juga berusaha untuk membangun Desa Wonokerto melalui Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Desa Wonokerto adalah salah satu Desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman yang secara administratif berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Desa wonokerto merupakan suatu desa yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi sosial budaya, segi ekonomi mau pun agama.

Dalam hal pembangunan yang terjadi di Desa Wonokerto masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada saat pelaksanaan Kulia Kerja Nyata (KKN), ditemukan bahwa dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Wonokerto tidak semua tim penyusun yang di bentuk ikut terlibat dalam proses penyusunan rancangan RKP Desa, dan permasalahan lainnya juga seperti tidak semua unsur masyarakat desa terlibat dalam Musyawarah Desa, tidak semua panitia

pelaksana RKP Desa yang di bentuk ikut terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja, serta tidak dilakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan (panitia pelaksana RKP Desa) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Serta juga beberapa permasalahan yang ada pada pemerintah desa wonokerto seperti, belum optimalnya Inventarisasi sumber PADesa belum optimal, dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih tahun 2015-2021, menggantikan Kepala Desa periode tahun 2009-2015, merupakan kendala dan permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan jalannya Pemerintahan Desa. Dengan tidak adanya kepala desa definitif membuat pelaksanaan APBDes Wonokerto tahun 2015 tertunda-tunda. Berkas APBDes tahun 2015 sudah siap namun tidak bisa diverifikasi. Hal ini membuat hambatan bagi semua kegiatan yang akan dilaksanakan. beberapa pelaksanaan program masih terhambat .

Selain masalah-masalah tersebut, terdapat pula beragam potensi yang ditemukan peneliti pada saat pelaksanaan Kulia Kerja Nyata (KKN) di Desa Wonokerto, seperti kuatnya Gotong royong serta swadaya dari masyarakat, lengkapnya organisasi unsur masyarakat Desa seperti PKK, LPMD, Karangtaruna, organisasi kelompok difabel serta tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani dan kelompok perajin. Dan ada pun potensi sumber daya alam seperti terdapat 26 sumber mata air, beberapa tambang batu dan pasir kali, potensi pertanian contohnya perkebunan salak, peternakan contohnya ternak sapi, ternak kambing, dan ternak ayam, dan perikanan seperti ikan lele. Serta industri rumahan yang meliputi industri rumahan keripik pisang, dan industri rumahan lainnya. Desa Wonokerto memiliki potensi lain yakni tanah yang sangat produktif hal ini dikarenakan secara geografis Desa Wonokerto berada di kaki gunung berapi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tanah tersebut di campuri oleh hamparan debu vulkanik yang diakibatkan dari meletusnya gunung merapi.

Suatu kondisi yang demikian menarik untuk mengetahui dan diteliti lebih dalam terkait dengan bagaimana Pemerintah Desa beserta masyarakat desa Wonokerto dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) di Desa Wonokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk Mendeskripsikan Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Dapat menambah referensi khususnya menyangkut masalah pembangunan Desa

2. Pemerintah Desa Wonokerto.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Desa Wonokerto dapat menjadikannya sebagai refleksi dalam penyempurnaan proses pelaksanaan pembangunan desa pada tahun berikutnya sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Desa Wonokerto dengan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga sesuai dengan target dan

DAFTAR PUSTAKA

- Borni Kurniawan. 2015. Buku 5. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Edisi Desember. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- M.Silahuddin. 2015. Buku 1. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sutoro Eko. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Sutoro Eko. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press
- Sutoro Eko, M. Barori, dan Hastowiyono. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD “APMD”
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahjudin Sumpeno, Edisi Kedua 2011. *Pembangunan Desa Terpadu*. Jakarta: CRS Indonesia
- Wahyudin Kessa. 2015, Buku 6. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sumber Lain

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

- Harry cristian.2015. *Studi tentang pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa (RKPDES) tahun 2013 di desa loa janan ulu kecamatan loa janan kabupaten kutai kartanegara*
- Utami Dewi. 2012. *Perencanaan pembangunan desa: pendekatan community learning and participatory process clapp*
- Oka, Nyoman. 2009. *Perencanaan Pembangunan Desa: Seri Panduan Fasilitator CLAPP (Community Learning And Action Participatory Process), MITRA SAMYA Dengan Dukungan Ausaid ACCESS*
- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Alqaprint.
- Wasistono Sadu dan Tahir Irawan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Suharyanto. 2017. *Strategi Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Manifestasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yogyakarta: Peneliti PKDOD
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1964. *Desa*. Bandung: Sumur
- Panduan Integrasi Pembangunan (PIP), PNPM Mandiri Perdesaan, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Jakarta 2010
- http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/ diakses pada tanggal 09 Mei 2017